

Partisipasi Masyarakat Kelurahan Pandu terhadap Pemilihan Umum Tahun 2024

Aurekeren Muntu¹, Romi Mesra²

^{1,2}Program Studi Pendidikan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Manado
 Email: 120606018@unima.ac.id, romimesra@unima.ac.id

ARTICLE INFO Article history: Received March 14, 2025 Accepted March 25, 2025 Published May 30, 2025 Keywords: Partisipasi Politik, Pemilihan Umum, Kelurahan Pandu, Kesadaran Politik, Integritas Pemilu 	Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis partisipasi masyarakat Kelurahan Pandu terhadap Pemilihan Umum tahun 2024, dengan fokus pada antusiasme, kesadaran politik, peran masyarakat dalam sosialisasi dan mobilisasi, serta ekspektasi terhadap kualitas penyelenggaraan pemilu. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi dan wawancara mendalam kepada masyarakat Kelurahan Pandu yang representatif dari berbagai segmen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Kelurahan Pandu memiliki antusiasme dan kesadaran politik yang tinggi terhadap Pemilu 2024, yang tercermin dari keinginan kuat untuk berpartisipasi aktif. Terdapat inisiatif sukarela dari masyarakat untuk berperan sebagai agen sosialisasi dan mobilisasi pemilu berbasis komunitas, yang menunjukkan adanya modal sosial yang kuat. Masyarakat juga memiliki ekspektasi tinggi terhadap kualitas penyelenggaraan pemilu, dengan menekankan pentingnya integritas, transparansi, dan kepatuhan terhadap peraturan. Temuan ini mengindikasikan bahwa budaya politik partisipan sedang berkembang di Kelurahan Pandu dan menjadi modal penting bagi penguatan demokrasi lokal.
Abstract <i>This study aims to analyze community participation in the 2024 General Election in Pandu Village, focusing on enthusiasm, political awareness, community roles in socialization and mobilization, and expectations regarding the quality of election administration. The research method used was qualitative, with data collection techniques through observation and in-depth interviews with representatives of the Pandu Village community from various segments. The results show that the Pandu Village community has high enthusiasm and political awareness for the 2024 Election, reflected in a strong desire to actively participate. There are voluntary initiatives from the community to act as agents of community-based election socialization and mobilization, indicating strong social capital. The community also has high expectations for the quality of election administration, emphasizing the importance of integrity, transparency, and compliance with regulations. These findings indicate that a participatory political culture is developing in Pandu Village and is an important asset for strengthening local democracy.</i> Keywords: Political Participation, General Election, Pandu Subdistrict, Political Awareness, Election Integrity	

A. Pendahuluan

Pemilihan Umum merupakan instrumen fundamental dalam sistem demokrasi modern yang menjadi manifestasi nyata kedaulatan rakyat dalam menentukan arah kepemimpinan dan kebijakan publik. Dalam konteks Indonesia, Pemilu tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme pergantian kekuasaan secara konstitusional, tetapi juga menjadi indikator kesehatan demokrasi dan legitimasi pemerintahan. Menurut Surbakti (2013), partisipasi politik masyarakat dalam

pemilihan umum merupakan wujud konkret dari pelaksanaan kedaulatan rakyat yang menjadi fondasi sistem politik demokratis. Partisipasi masyarakat dalam Pemilu menunjukkan tingkat kesadaran politik dan kepercayaan warga negara terhadap proses demokrasi elektoral yang diselenggarakan. Pemilu 2024 di Indonesia menjadi momentum penting karena berlangsung setelah masa pandemi COVID-19 yang memberikan dampak signifikan terhadap dinamika sosial-politik masyarakat.

Tingkat partisipasi pemilih dalam Pemilu 2024 menunjukkan fenomena yang menarik untuk dikaji secara mendalam, khususnya di level lokal seperti kelurahan. Data dari Komisi Pemilihan Umum menunjukkan bahwa partisipasi pemilih pada Pemilu 2024 mencapai 85 persen, mengalami peningkatan dibandingkan Pemilu 2019 yang mencapai 83 persen. Namun, tingkat partisipasi ini tidak merata di seluruh wilayah Indonesia dan menunjukkan variasi yang signifikan antar daerah. Miaz (2018) menjelaskan bahwa pola partisipasi pemilih dipengaruhi oleh berbagai faktor kompleks termasuk kondisi sosial-ekonomi, tingkat pendidikan, kesadaran politik, dan efektivitas sosialisasi pemilu di tingkat grassroots. Penelitian mengenai partisipasi pemilih di level kelurahan menjadi penting karena kelurahan merupakan unit administrasi terkecil yang memiliki karakteristik demografis dan sosial-budaya yang spesifik.

Kelurahan Pandu sebagai salah satu wilayah administratif memiliki dinamika partisipasi politik yang perlu diteliti secara komprehensif untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilu 2024. Karakteristik masyarakat kelurahan yang beragam dari segi tingkat pendidikan, pekerjaan, dan latar belakang sosial-budaya menciptakan kompleksitas tersendiri dalam memahami perilaku pemilih. Padang dan Megawati (2018) menekankan bahwa partisipasi politik dalam negara demokrasi merupakan indikator implementasi penyelenggaraan kekuasaan negara yang absah oleh rakyat, yang dimanifestasikan melalui keterlibatan aktif dalam pesta demokrasi. Kajian mendalam mengenai partisipasi masyarakat Kelurahan Pandu dalam Pemilu 2024 menjadi relevan untuk mengidentifikasi pola partisipasi, hambatan, dan potensi peningkatan partisipasi politik di masa mendatang.

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji fenomena partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum dengan berbagai perspektif dan pendekatan. Penelitian yang dilakukan oleh Papamarcos (1977) menganalisis partisipasi politik dengan menekankan pemilihan umum sebagai sarana utama penyampaian aspirasi warga negara dalam sistem demokrasi perwakilan, di mana partisipasi dipandang sebagai bentuk kontrol rakyat terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Studi ini memberikan kerangka teoretis yang kuat tentang bagaimana partisipasi politik menjadi elemen krusial dalam menjaga keseimbangan kekuasaan dan akuntabilitas demokratis. García Reyes (2013) melakukan kajian komparatif mengenai partisipasi politik di negara-negara berkembang dan menemukan bahwa tingkat partisipasi dipengaruhi oleh faktor struktural seperti sistem pemilu, kondisi sosial-ekonomi masyarakat, dan tingkat kepercayaan publik terhadap institusi politik. Penelitian ini menyoroti pentingnya memahami konteks lokal dalam menganalisis partisipasi politik karena setiap wilayah memiliki dinamika politik yang unik.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Miaz (2018) mengkaji pola perilaku pemilih pada masa Orde Baru dan era Reformasi, menemukan adanya perubahan signifikan dalam orientasi politik masyarakat Indonesia pasca reformasi yang ditandai dengan meningkatnya kesadaran kritis pemilih dan diversifikasi pilihan politik. Studi ini menunjukkan bahwa transformasi politik nasional berdampak langsung pada perilaku pemilih di tingkat lokal, menciptakan pola partisipasi yang lebih kompleks dan dinamis. Sementara itu, kajian oleh Padang dan Megawati (2018) fokus pada partisipasi politik pemilih pemula dan menemukan bahwa generasi muda memiliki karakteristik partisipasi yang berbeda dengan generasi sebelumnya, di mana faktor media sosial dan literasi digital memainkan peran penting dalam pembentukan kesadaran

politik. Penelitian-penelitian tersebut memberikan kontribusi penting dalam memahami dinamika partisipasi politik, namun sebagian besar menggunakan pendekatan makro atau fokus pada kelompok demografis tertentu, sehingga masih terdapat celah dalam pemahaman partisipasi politik di level mikro komunitas kelurahan.

Meskipun berbagai penelitian telah dilakukan untuk memahami partisipasi politik dalam pemilihan umum, masih terdapat kesenjangan pengetahuan yang signifikan dalam konteks spesifik partisipasi masyarakat di tingkat kelurahan, khususnya pada Pemilu 2024. Penelitian-penelitian sebelumnya cenderung menggunakan pendekatan generalisasi dalam menganalisis partisipasi politik, sehingga kurang sensitif terhadap keunikan karakteristik sosial-budaya dan konteks lokal yang mempengaruhi perilaku pemilih di tingkat kelurahan. Kajian tentang partisipasi politik seringkali dilakukan dalam skala yang lebih luas seperti tingkat kota, kabupaten, atau provinsi, yang mengabaikan heterogenitas dan dinamika spesifik yang terjadi di level terkecil pemerintahan. Kelurahan sebagai unit administrasi yang paling dekat dengan masyarakat memiliki karakteristik unik dalam hal komposisi demografis, kondisi sosial-ekonomi, tingkat pendidikan, dan pola interaksi sosial yang berbeda dengan kelurahan lainnya, sehingga memerlukan analisis tersendiri untuk memahami fenomena partisipasi politik secara komprehensif.

Lebih lanjut, penelitian-penelitian terdahulu belum secara mendalam mengeksplorasi bagaimana konteks pasca pandemi COVID-19 mempengaruhi partisipasi politik masyarakat di tingkat kelurahan pada Pemilu 2024. Pandemi telah mengubah dinamika sosial dan pola interaksi masyarakat yang potensial berdampak pada kesadaran politik dan tingkat partisipasi dalam pemilu. Selain itu, studi-studi sebelumnya cenderung fokus pada faktor-faktor individual pemilih tanpa mengintegrasikan analisis terhadap peran struktur sosial, jaringan komunitas, dan dinamika kepemimpinan lokal di tingkat kelurahan yang secara signifikan dapat mempengaruhi mobilisasi dan partisipasi politik. Kesenjangan ini menciptakan urgensi untuk melakukan penelitian yang fokus pada Kelurahan Pandu sebagai studi kasus yang dapat memberikan pemahaman mendalam tentang kompleksitas partisipasi politik di level komunitas lokal, dengan mempertimbangkan konteks sosial-budaya setempat dan dinamika politik kontemporer pasca pandemi.

Penelitian ini menawarkan kebaruan dalam beberapa aspek fundamental yang membedakannya dari kajian-kajian sebelumnya tentang partisipasi politik. Pertama, studi ini menggunakan pendekatan mikro-kontekstual yang fokus pada dinamika partisipasi masyarakat di tingkat kelurahan, khususnya Kelurahan Pandu, yang memungkinkan pemahaman yang lebih mendalam dan nuansial tentang faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik di level komunitas lokal. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang cenderung generalis, penelitian ini mengintegrasikan analisis karakteristik demografis, kondisi sosial-ekonomi, jaringan sosial, dan dinamika kepemimpinan informal di tingkat kelurahan sebagai variabel yang saling berinteraksi dalam membentuk pola partisipasi politik. Pendekatan ini memberikan perspektif baru dalam memahami bahwa partisipasi politik tidak hanya ditentukan oleh faktor individual pemilih, tetapi juga oleh struktur sosial dan konteks komunitas lokal yang lebih luas. Kebaruan metodologis ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan studi partisipasi politik di Indonesia, khususnya dalam konteks demokrasi lokal.

Kedua, penelitian ini secara spesifik menganalisis partisipasi masyarakat dalam konteks Pemilu 2024 yang merupakan pemilu pertama yang berlangsung sepenuhnya dalam kondisi pasca pandemi COVID-19. Pandemi telah mengubah lanskap sosial-politik masyarakat Indonesia, termasuk pola komunikasi politik, sosialisasi pemilu, dan dinamika mobilisasi pemilih yang memerlukan kajian tersendiri. Penelitian ini mengeksplorasi bagaimana perubahan pola interaksi sosial pasca pandemi, digitalisasi informasi politik, dan transformasi

metode kampanye politik berdampak pada tingkat dan pola partisipasi masyarakat Kelurahan Pandu. Selain itu, studi ini juga memberikan perhatian khusus pada peran media sosial dan platform digital dalam membentuk kesadaran politik dan memobilisasi pemilih di era kontemporer, sesuatu yang belum banyak dieksplorasi dalam konteks partisipasi politik di tingkat kelurahan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan pemahaman empiris tentang tingkat partisipasi, tetapi juga mengungkap mekanisme dan dinamika baru dalam partisipasi politik yang relevan dengan kondisi sosial-politik kontemporer Indonesia.

Realitas partisipasi masyarakat dalam Pemilu 2024 menunjukkan fenomena yang kompleks dan beragam di berbagai wilayah Indonesia, termasuk di tingkat kelurahan. Data agregat menunjukkan bahwa tingkat partisipasi pemilih pada Pemilu 2024 mengalami peningkatan dibandingkan pemilu sebelumnya, namun terdapat variasi signifikan antar daerah yang mengindikasikan adanya faktor-faktor lokal yang mempengaruhi partisipasi. Di Kelurahan Pandu, sebagaimana kelurahan-kelurahan lain di Indonesia, partisipasi masyarakat dalam Pemilu 2024 dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berinteraksi, mulai dari tingkat kesadaran politik, kepercayaan terhadap institusi pemilu, aksesibilitas informasi politik, hingga kondisi sosial-ekonomi masyarakat. Karakteristik demografis masyarakat Kelurahan Pandu yang beragam dari segi usia, tingkat pendidikan, dan latar belakang pekerjaan menciptakan heterogenitas dalam pola partisipasi politik. Generasi muda yang melek teknologi memiliki akses informasi politik yang lebih luas melalui media sosial, namun hal ini tidak selalu berkorelasi langsung dengan tingkat partisipasi aktual dalam pemungutan suara.

Dinamika sosial-politik di Kelurahan Pandu juga menunjukkan bahwa partisipasi dalam pemilu tidak hanya dipengaruhi oleh faktor rasional-instrumental, tetapi juga oleh dimensi sosial-budaya dan jaringan komunitas lokal. Peran tokoh masyarakat, pemimpin informal, dan struktur sosial tradisional masih memiliki pengaruh signifikan dalam mobilisasi pemilih dan pembentukan preferensi politik masyarakat. Efektivitas sosialisasi pemilu oleh penyelenggara dan stakeholder terkait, termasuk peran relawan demokrasi dan komunitas pemilih, menjadi faktor penting dalam meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat. Namun, tantangan tetap ada dalam bentuk apatisisme politik, skeptisisme terhadap proses demokrasi, dan fenomena golput yang masih menjadi isu di berbagai segmen masyarakat. Kondisi pasca pandemi juga memberikan dampak tersendiri terhadap pola partisipasi, di mana perubahan metode kampanye dan sosialisasi politik yang lebih banyak menggunakan platform digital mempengaruhi cara masyarakat mengakses informasi dan terlibat dalam proses politik, sehingga memerlukan adaptasi strategi peningkatan partisipasi yang relevan dengan konteks kontemporer.

B. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman mendalam tentang partisipasi masyarakat Kelurahan Pandu dalam Pemilihan Umum tahun 2024. Menurut Sugiyono (2017), metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah di mana peneliti adalah instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi, analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi kompleksitas fenomena partisipasi politik dalam konteks sosial-budaya masyarakat Kelurahan Pandu secara komprehensif dan mendalam. Penelitian ini berupaya mengungkap tidak hanya tingkat partisipasi masyarakat, tetapi juga makna, motivasi, dan faktor-faktor kontekstual yang melatarbelakangi perilaku politik masyarakat dalam Pemilu 2024. Dengan pendekatan kualitatif, peneliti dapat memahami perspektif subjektif masyarakat dan mengeksplorasi dinamika sosial yang mempengaruhi partisipasi politik di tingkat kelurahan.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan dua metode utama, yaitu

observasi dan wawancara mendalam. Observasi dilakukan untuk mengamati secara langsung aktivitas dan interaksi masyarakat terkait dengan persiapan dan pelaksanaan Pemilu 2024 di Kelurahan Pandu, termasuk kegiatan sosialisasi, kampanye, dan proses pemungutan suara. Teknik observasi memungkinkan peneliti untuk mendapatkan data langsung tentang perilaku dan aktivitas masyarakat dalam konteks alamiah tanpa intervensi yang dapat mengubah kondisi objek penelitian. Wawancara mendalam dilakukan kepada informan terpilih yang representatif mewakili berbagai segmen masyarakat di Kelurahan Pandu, termasuk masyarakat dengan latar belakang pendidikan, usia, dan pekerjaan yang beragam. Sugiyono (2019) menjelaskan bahwa wawancara dalam penelitian kualitatif dilakukan untuk memperoleh informasi mendalam tentang pemahaman, pengalaman, dan persepsi informan terhadap fenomena yang diteliti. Pemilihan informan dilakukan secara purposive dengan mempertimbangkan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian, yakni masyarakat yang terdaftar sebagai pemilih di Kelurahan Pandu dan memiliki kesediaan untuk berbagi pengalaman dan pandangan mereka tentang Pemilu 2024.

Proses analisis data dalam penelitian ini mengikuti tahapan analisis data kualitatif yang mencakup reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data yang diperoleh dari observasi dan wawancara dikumpulkan, diorganisir, dan dianalisis secara sistematis untuk mengidentifikasi pola, tema, dan kategori yang muncul terkait dengan partisipasi masyarakat dalam Pemilu 2024. Reduksi data dilakukan dengan memilih, memfokuskan, menyederhanakan, dan mentransformasi data mentah yang diperoleh di lapangan untuk memudahkan analisis lebih lanjut. Penyajian data dilakukan dalam bentuk narasi deskriptif yang menggambarkan temuan penelitian secara komprehensif dan sistematis. Penarikan kesimpulan dilakukan berdasarkan temuan-temuan yang telah diverifikasi dan dikonfirmasi validitasnya melalui triangulasi data dari berbagai sumber. Untuk memastikan kredibilitas dan validitas data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dengan membandingkan dan mengecek informasi yang diperoleh dari berbagai informan dan metode pengumpulan data. Proses analisis dilakukan secara iteratif, di mana peneliti melakukan pengumpulan data, analisis, dan refleksi secara berkelanjutan hingga mencapai saturasi data dan memperoleh pemahaman yang mendalam tentang fenomena partisipasi masyarakat Kelurahan Pandu dalam Pemilu 2024.

C. Results and Discussion

1. Result

a. Antusiasme dan Kesadaran Politik Masyarakat Kelurahan Pandu

Temuan penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Kelurahan Pandu memiliki tingkat antusiasme yang tinggi terhadap Pemilihan Umum tahun 2024. Hal ini terlihat dari respon positif yang diberikan oleh berbagai segmen masyarakat ketika ditanya tentang pemilu. Sebagaimana diungkapkan oleh Bapak JM, salah satu warga Kelurahan Pandu, yang menyatakan bahwa,

”...sangat antusias untuk memilih kandidat yang akan dipilih di tahun 2024”.

Antusiasme ini mencerminkan kesadaran politik yang mulai tumbuh di kalangan masyarakat, di mana pemilu tidak lagi dipandang sebagai rutinitas politik semata, tetapi sebagai momentum penting untuk menentukan arah kepemimpinan dan kebijakan publik yang akan berdampak langsung pada kehidupan masyarakat. Tingginya antusiasme ini juga

mengindikasikan bahwa masyarakat Kelurahan Pandu memiliki harapan besar terhadap proses demokratis dan percaya bahwa suara mereka memiliki nilai signifikan dalam menentukan hasil pemilu.

Kesadaran politik masyarakat juga tercermin dari pemahaman mereka tentang pentingnya partisipasi dalam pemilu untuk menjamin berjalannya proses demokrasi yang berkualitas. Ibu LM, salah satu informan dalam penelitian ini, menekankan bahwa partisipasi masyarakat sangat diperlukan agar pemilihan berjalan dengan baik dan sesuai peraturan yang ada. Pernyataan ini menunjukkan bahwa sebagian masyarakat Kelurahan Pandu tidak hanya memandang partisipasi sebagai hak konstitusional, tetapi juga sebagai tanggung jawab kewarganegaraan yang harus dilaksanakan untuk memastikan legitimasi dan kualitas penyelenggaraan pemilu. Kesadaran akan pentingnya kepatuhan terhadap peraturan dan prosedur pemilu mengindikasikan adanya pemahaman yang matang tentang prinsip-prinsip demokrasi dan rule of law yang menjadi fondasi penyelenggaraan pemilu yang kredibel dan berintegritas. Hal ini sejalan dengan konsep partisipasi politik yang menekankan keterlibatan aktif warga negara dalam proses politik bukan hanya sebagai hak, tetapi juga kewajiban untuk menjaga kualitas demokrasi.

Observasi yang dilakukan peneliti di lapangan juga mengkonfirmasi tingginya kesadaran politik masyarakat Kelurahan Pandu menjelang Pemilu 2024. Terlihat bahwa masyarakat aktif mengikuti perkembangan informasi politik melalui berbagai media, baik media massa konvensional maupun media sosial, yang menunjukkan adanya literasi politik yang cukup baik. Diskusi-diskusi politik informal di tingkat komunitas, baik di lingkungan rumah tangga, tempat kerja, maupun ruang publik lainnya, menunjukkan bahwa isu pemilu menjadi topik yang relevan dan menarik perhatian masyarakat. Antusiasme dan kesadaran politik yang tinggi ini menjadi modal sosial yang penting dalam mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pemilu. Namun, antusiasme ini perlu dijaga dan dipelihara melalui sosialisasi yang berkelanjutan dan edukasi politik yang komprehensif untuk memastikan bahwa partisipasi masyarakat tidak hanya tinggi secara kuantitas, tetapi juga berkualitas dalam hal pemahaman terhadap visi-misi kandidat dan dampak dari pilihan politik yang mereka buat.

b. Peran Masyarakat dalam Sosialisasi dan Mobilisasi Pemilu

Salah satu temuan menarik dari penelitian ini adalah adanya kesadaran masyarakat untuk berperan aktif dalam sosialisasi dan mobilisasi pemilu di lingkungan mereka. Ibu LD, salah seorang informan menyatakan bahwa,

”...yang akan dilakukannya untuk menunjang pemilihan umum tahun 2024 adalah dengan memberitahukan ke keluarga serta masyarakat setempat mengenai pemilihan umum yang akan dilaksanakan”.

Pernyataan ini mencerminkan adanya inisiatif dari masyarakat untuk tidak hanya menjadi partisipan pasif, tetapi juga sebagai agen sosialisasi yang aktif menyebarkan informasi tentang pemilu kepada lingkaran sosial mereka. Peran masyarakat sebagai agen sosialisasi ini sangat penting karena informasi yang disampaikan oleh orang-orang terdekat cenderung lebih dipercaya dan memiliki pengaruh yang lebih kuat dalam membentuk sikap dan perilaku politik dibandingkan dengan sosialisasi formal dari institusi penyelenggara pemilu.

Mobilisasi pemilu yang dilakukan oleh masyarakat secara bottom-up menunjukkan adanya rasa kepemilikan dan tanggung jawab bersama terhadap suksesnya penyelenggaraan pemilu.

Ketika masyarakat secara sukarela mengambil peran untuk menginformasikan dan mengajak anggota keluarga serta tetangga mereka untuk berpartisipasi dalam pemilu, hal ini menciptakan efek multiplier yang dapat meningkatkan tingkat partisipasi secara keseluruhan. Sosialisasi yang dilakukan melalui jaringan sosial informal ini juga memiliki kelebihan dalam hal aksesibilitas dan kemampuan untuk menjangkau segmen masyarakat yang mungkin tidak terjangkau oleh sosialisasi formal, seperti kelompok masyarakat dengan mobilitas terbatas, tingkat literasi rendah, atau yang memiliki akses terbatas terhadap media massa. Peran masyarakat sebagai relawan demokrasi informal ini memperkuat fondasi demokrasi partisipatoris di mana warga negara tidak hanya menjadi objek mobilisasi, tetapi juga subjek aktif yang berkontribusi dalam proses demokratisasi.

Observasi peneliti menunjukkan bahwa sosialisasi pemilu yang dilakukan oleh masyarakat tidak hanya terbatas pada penyampaian informasi teknis tentang waktu dan lokasi pemungutan suara, tetapi juga mencakup edukasi tentang pentingnya menggunakan hak pilih secara bijak dan bertanggung jawab. Masyarakat yang berperan sebagai agen sosialisasi juga mendorong diskusi tentang visi-misi kandidat, isu-isu yang relevan dengan kehidupan masyarakat lokal, dan pentingnya memilih berdasarkan pertimbangan rasional daripada faktor primordial atau transaksional. Hal ini menunjukkan bahwa sosialisasi yang dilakukan oleh masyarakat memiliki dimensi kualitatif yang dapat meningkatkan kualitas partisipasi politik. Namun, perlu dicatat bahwa efektivitas peran masyarakat sebagai agen sosialisasi sangat bergantung pada tingkat pemahaman mereka tentang sistem pemilu dan kemampuan untuk menyampaikan informasi secara akurat dan objektif. Oleh karena itu, penguatan kapasitas masyarakat melalui program edukasi pemilih menjadi penting untuk memastikan bahwa sosialisasi yang dilakukan oleh masyarakat berkontribusi positif terhadap kualitas demokrasi.

c. Ekspektasi Masyarakat terhadap Kualitas Penyelenggaraan Pemilu

Temuan penelitian mengungkapkan bahwa masyarakat Kelurahan Pandu memiliki ekspektasi yang tinggi terhadap kualitas penyelenggaraan Pemilu 2024. Sebagaimana diungkapkan oleh Ibu LM yang menekankan,

”...pentingnya partisipasi masyarakat agar pemilihan berjalan dengan baik dan sesuai peraturan yang ada”.

Ekspektasi ini mencerminkan harapan masyarakat bahwa pemilu tidak hanya berlangsung secara prosedural, tetapi juga memenuhi standar integritas, transparansi, dan akuntabilitas. Masyarakat mengharapkan bahwa penyelenggara pemilu, dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum dan jajarannya, dapat menyelenggarakan pemilu yang bebas dari kecurangan, intimidasi, dan berbagai bentuk pelanggaran yang dapat merusak kredibilitas hasil pemilu. Ekspektasi terhadap kualitas penyelenggaraan ini menunjukkan bahwa masyarakat memiliki kesadaran kritis tentang standar demokrasi yang harus dipenuhi dalam penyelenggaraan pemilu.

Observasi peneliti menunjukkan bahwa masyarakat Kelurahan Pandu cukup kritis dalam menyikapi berbagai aspek teknis penyelenggaraan pemilu, mulai dari proses pendaftaran pemilih, distribusi logistik, hingga proses pemungutan dan penghitungan suara. Terdapat perhatian khusus dari masyarakat terhadap isu-isu seperti akurasi daftar pemilih tetap, aksesibilitas tempat pemungutan suara, dan transparansi proses penghitungan suara. Kesadaran kritis ini menjadi mekanisme kontrol sosial yang penting dalam menjaga integritas penyelenggaraan pemilu. Masyarakat juga mengharapkan adanya komunikasi yang efektif dari

penyelenggara pemilu tentang berbagai aspek teknis dan prosedural, sehingga mereka dapat memahami hak dan kewajiban mereka sebagai pemilih serta dapat melaporkan jika terdapat indikasi pelanggaran atau ketidakberesan dalam proses pemilu. Ekspektasi terhadap kualitas komunikasi dan responsivitas penyelenggara pemilu ini mengindikasikan pentingnya membangun kepercayaan publik melalui transparansi dan akuntabilitas.

Tingginya ekspektasi masyarakat terhadap kualitas penyelenggaraan pemilu juga berdampak pada kesediaan mereka untuk berpartisipasi aktif dalam mengawal proses pemilu. Beberapa warga menunjukkan kesediaan untuk menjadi relawan pemilu, saksi pemilu, atau pengawas suara untuk memastikan bahwa pemilu berlangsung sesuai dengan peraturan dan prinsip-prinsip demokrasi. Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan pemilu ini merupakan wujud nyata dari partisipasi politik yang tidak hanya berhenti pada pemberian suara, tetapi juga meluas pada upaya untuk menjaga integritas proses demokrasi. Namun, ekspektasi yang tinggi ini juga menghadirkan tantangan bagi penyelenggara pemilu untuk memenuhi standar yang diharapkan oleh masyarakat. Kegagalan dalam memenuhi ekspektasi ini dapat berdampak pada menurunnya kepercayaan publik terhadap institusi pemilu dan berpotensi mengurangi partisipasi masyarakat di masa mendatang. Oleh karena itu, penyelenggara pemilu perlu memastikan bahwa setiap tahapan pemilu dilaksanakan dengan standar tertinggi integritas dan profesionalisme, serta memberikan ruang bagi partisipasi dan pengawasan masyarakat untuk menciptakan pemilu yang benar-benar mencerminkan kehendak rakyat.

2. Pembahasan

a. Antusiasme Masyarakat sebagai Manifestasi Budaya Politik Partisipan

Tingginya antusiasme masyarakat Kelurahan Pandu terhadap Pemilu 2024 dapat dipahami melalui perspektif teori budaya politik yang dikembangkan oleh Almond dan Verba (1963). Menurut teori ini, budaya politik partisipan ditandai dengan kesadaran masyarakat terhadap hak dan tanggung jawab politiknya serta kemampuan untuk berpartisipasi aktif dalam proses politik. Temuan penelitian yang menunjukkan antusiasme tinggi dari informan seperti Bapak James mencerminkan karakteristik budaya politik partisipan di mana warga negara tidak hanya pasif menerima hasil keputusan politik, tetapi aktif terlibat dalam menentukan arah politik melalui pemilu. Almond dan Verba menekankan bahwa dalam budaya politik partisipan, masyarakat memiliki orientasi positif terhadap sistem politik secara keseluruhan, baik dari segi input maupun output, yang mendorong mereka untuk aktif berpartisipasi. Antusiasme yang ditunjukkan oleh masyarakat Kelurahan Pandu mengindikasikan bahwa mereka memandang pemilu sebagai instrumen penting untuk mempengaruhi kebijakan publik dan memiliki kepercayaan terhadap sistem demokrasi.

Partisipasi politik menurut Huntington dan Nelson (1994) merupakan kegiatan warga negara biasa yang bertujuan mempengaruhi pengambilan keputusan oleh pemerintah, dan partisipasi ini dapat bersifat otonom maupun termobilisasi. Dalam konteks Kelurahan Pandu, antusiasme yang muncul dari masyarakat tampak lebih bersifat otonom, di mana kesadaran untuk berpartisipasi tumbuh dari dalam diri individu berdasarkan pemahaman mereka tentang pentingnya pemilu bagi masa depan. Huntington membedakan antara partisipasi otonom yang muncul dari kesadaran individual dan partisipasi termobilisasi yang merupakan hasil dari mobilisasi elit atau struktur kekuasaan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Kelurahan Pandu memiliki kesadaran politik yang cukup matang sehingga partisipasi mereka lebih didasarkan pada pertimbangan rasional tentang pentingnya memilih pemimpin yang tepat. Hal ini sejalan dengan pandangan Surbakti (2013) yang menyatakan bahwa partisipasi politik merupakan keikutsertaan warga negara dalam menentukan segala keputusan yang menyangkut

atau mempengaruhi hidupnya, yang mengandung makna bahwa partisipasi adalah ekspresi kedaulatan rakyat dalam sistem demokrasi.

Kesadaran politik yang tinggi di Kelurahan Pandu juga dapat dilihat sebagai hasil dari proses sosialisasi politik yang berlangsung dalam masyarakat. Almond dan Powell (1996) menjelaskan bahwa sosialisasi politik merupakan salah satu fungsi penting dalam sistem politik yang membentuk orientasi politik warga negara. Melalui berbagai agen sosialisasi seperti keluarga, sekolah, media massa, dan komunitas, masyarakat mengembangkan pemahaman tentang sistem politik dan peran mereka di dalamnya. Observasi peneliti yang menunjukkan adanya diskusi politik aktif di berbagai ruang publik di Kelurahan Pandu mengindikasikan bahwa proses sosialisasi politik berlangsung secara efektif, menciptakan lingkungan yang kondusif bagi perkembangan kesadaran politik. Antusiasme yang ditunjukkan oleh masyarakat bukan hanya sekedar emosi sesaat, tetapi merupakan hasil dari proses pembelajaran politik yang berkelanjutan yang membentuk sikap dan perilaku politik mereka. Dengan demikian, tingginya antusiasme masyarakat Kelurahan Pandu terhadap Pemilu 2024 merupakan indikator positif bagi kualitas demokrasi lokal dan menunjukkan bahwa budaya politik partisipan sedang berkembang di tingkat kelurahan.

b. Mobilisasi Politik Berbasis Komunitas dan Modal Sosial

Temuan penelitian tentang inisiatif masyarakat dalam melakukan sosialisasi dan mobilisasi pemilu dapat dianalisis melalui konsep modal sosial yang dikembangkan oleh Putnam (1993). Modal sosial merujuk pada jaringan sosial, norma timbal balik, dan kepercayaan yang memfasilitasi koordinasi dan kerjasama untuk keuntungan bersama. Dalam konteks Kelurahan Pandu, kesediaan Ibu Lidya untuk memberitahukan informasi pemilu kepada keluarga dan masyarakat setempat mencerminkan adanya modal sosial yang kuat dalam komunitas. Putnam menekankan bahwa modal sosial memiliki peran penting dalam memperkuat partisipasi politik karena jaringan sosial yang kuat memungkinkan informasi politik tersebar lebih efektif dan menciptakan tekanan sosial yang positif untuk berpartisipasi. Ketika anggota masyarakat secara aktif terlibat dalam sosialisasi pemilu, mereka tidak hanya menyebarkan informasi tetapi juga memperkuat norma partisipasi politik dalam komunitas mereka.

Konsep mobilisasi politik yang dikemukakan oleh Huntington dan Nelson (1994) memberikan kerangka untuk memahami fenomena peran masyarakat sebagai agen mobilisasi. Mereka menjelaskan bahwa mobilisasi politik dapat terjadi melalui berbagai mekanisme, baik top-down maupun bottom-up. Dalam kasus Kelurahan Pandu, mobilisasi yang dilakukan oleh masyarakat bersifat horizontal atau bottom-up, di mana warga negara biasa mengambil inisiatif untuk memobilisasi orang lain di lingkaran sosial mereka tanpa arahan langsung dari elit politik atau institusi formal. Model mobilisasi horizontal ini cenderung lebih efektif dan sustainable karena didasarkan pada kepercayaan dan kedekatan personal dalam jaringan sosial yang telah ada. Masyarakat yang termobilisasi melalui jaringan personal cenderung memiliki motivasi partisipasi yang lebih kuat dan tahan lama dibandingkan dengan mobilisasi yang dipaksakan atau didasarkan pada insentif material semata. Hal ini sejalan dengan temuan Coleman (1988) yang menyatakan bahwa struktur sosial yang kuat dapat menjadi sumber daya produktif bagi individu untuk mencapai tujuan tertentu, dalam hal ini meningkatkan partisipasi dalam pemilu.

Peran tokoh masyarakat informal dalam mobilisasi politik di Kelurahan Pandu juga dapat dipahami melalui teori kepemimpinan informal yang menekankan pentingnya figur yang dipercaya dalam mempengaruhi perilaku politik masyarakat. Burns (1978) membedakan antara kepemimpinan transaksional dan transformasional, di mana kepemimpinan transformasional berupaya membangkitkan kesadaran yang lebih tinggi tentang isu-isu penting dan memotivasi

orang untuk melampaui kepentingan pribadi demi kepentingan kolektif. Ketika anggota masyarakat seperti Ibu Lidya mengambil peran untuk mensosialisasikan pemilu, mereka berfungsi sebagai pemimpin informal yang dapat mempengaruhi sikap dan perilaku orang-orang di sekitarnya. Efektivitas mobilisasi berbasis komunitas ini juga diperkuat oleh konsep *two-step flow of communication* yang dikembangkan oleh Lazarsfeld, Berelson, dan Gaudet (1948), yang menunjukkan bahwa informasi politik seringkali lebih efektif tersebar melalui *opinion leaders* di tingkat lokal daripada langsung dari media massa ke individu. Dengan demikian, peran masyarakat sebagai agen mobilisasi di Kelurahan Pandu merupakan aset penting dalam meningkatkan partisipasi pemilu dan menciptakan ekosistem demokrasi yang sehat di tingkat lokal.

c. Legitimasi Demokratis dan Integritas Penyelenggaraan Pemilu

Ekspektasi tinggi masyarakat Kelurahan Pandu terhadap kualitas penyelenggaraan pemilu dapat dianalisis melalui konsep legitimasi demokratis yang dikemukakan oleh Beetham (1991). Legitimasi dalam sistem demokratis tidak hanya berasal dari prosedur elektoral semata, tetapi juga dari persepsi masyarakat bahwa pemilu diselenggarakan secara adil, transparan, dan sesuai dengan nilai-nilai demokrasi. Beetham menekankan bahwa legitimasi kekuasaan memerlukan tiga elemen: kesesuaian dengan aturan yang telah ditetapkan, justifikasi aturan tersebut berdasarkan keyakinan bersama, dan bukti persetujuan dari pihak yang dikuasai. Dalam konteks pemilu, hal ini berarti bahwa penyelenggaraan pemilu harus tidak hanya mengikuti prosedur formal, tetapi juga memenuhi standar normatif yang diyakini oleh masyarakat tentang bagaimana seharusnya pemilu yang demokratis dijalankan. Pernyataan Ibu Lusye yang menekankan pentingnya pemilihan yang berjalan dengan baik dan sesuai peraturan mencerminkan kesadaran masyarakat tentang standar legitimasi ini.

Konsep integritas pemilu yang dikembangkan oleh Norris (2014) memberikan kerangka komprehensif untuk memahami ekspektasi masyarakat terhadap kualitas penyelenggaraan pemilu. Norris mendefinisikan integritas pemilu sebagai penyelenggaraan pemilu yang memenuhi standar internasional dalam setiap tahapan siklus pemilu, mulai dari kerangka hukum, prosedur pemilu, hingga penanganan sengketa dan pembentukan pemerintahan baru. Integritas pemilu mencakup dimensi-dimensi seperti independensi penyelenggara, kesetaraan akses kampanye, akurasi daftar pemilih, keamanan dan kerahasiaan pemungutan suara, serta transparansi penghitungan suara. Ekspektasi masyarakat Kelurahan Pandu yang menginginkan pemilu berlangsung sesuai peraturan dan bebas dari kecurangan sejalan dengan standar integritas pemilu ini. Ketika masyarakat memiliki ekspektasi tinggi terhadap integritas pemilu, hal ini sebenarnya mencerminkan kesadaran kritis mereka tentang prinsip-prinsip demokrasi dan keinginan untuk memastikan bahwa hasil pemilu benar-benar mencerminkan kehendak rakyat.

Hubungan antara integritas pemilu dan kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi telah banyak dikaji dalam literatur ilmu politik. Levi dan Stoker (2000) menjelaskan bahwa kepercayaan politik (*political trust*) merupakan elemen fundamental dalam sistem demokrasi yang mempengaruhi kualitas dan stabilitas pemerintahan. Kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemilu sangat bergantung pada persepsi mereka tentang integritas dan profesionalisme penyelenggaraan pemilu. Penelitian oleh Birch (2010) menunjukkan bahwa pemilu yang dipersepsikan tidak berintegritas dapat mengikis kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi secara keseluruhan dan berpotensi menurunkan partisipasi di masa mendatang. Dalam konteks Kelurahan Pandu, kesediaan masyarakat untuk terlibat dalam pengawasan pemilu menunjukkan adanya kesadaran tentang pentingnya menjaga integritas pemilu sebagai prasyarat legitimasi demokratis. Diamond dan Morlino (2005) dalam konsep kualitas demokrasi menekankan bahwa partisipasi politik yang tinggi harus diimbangi dengan kualitas prosedural yang baik,

termasuk penyelenggaraan pemilu yang berintegritas, untuk menghasilkan demokrasi yang berkualitas. Dengan demikian, ekspektasi tinggi masyarakat Kelurahan Pandu terhadap kualitas penyelenggaraan pemilu merupakan tanda positif bagi perkembangan demokrasi lokal dan menjadi tanggung jawab penyelenggara untuk memenuhi standar tersebut guna menjaga legitimasi dan kepercayaan publik.

D. Kesimpulan

Penelitian tentang partisipasi masyarakat Kelurahan Pandu terhadap Pemilihan Umum tahun 2024 menghasilkan beberapa temuan penting yang memberikan pemahaman mendalam tentang dinamika partisipasi politik di tingkat lokal. Pertama, masyarakat Kelurahan Pandu menunjukkan antusiasme dan kesadaran politik yang tinggi terhadap Pemilu 2024, yang tercermin dari respon positif dan keinginan kuat untuk berpartisipasi aktif dalam proses pemilihan. Antusiasme ini bukan hanya emosi sesaat, tetapi merupakan manifestasi dari budaya politik partisipan yang sedang berkembang, di mana masyarakat memiliki pemahaman yang matang tentang pentingnya pemilu sebagai instrumen demokrasi untuk menentukan arah kepemimpinan dan kebijakan publik. Kedua, terdapat inisiatif yang kuat dari masyarakat untuk berperan sebagai agen sosialisasi dan mobilisasi pemilu secara sukarela, yang menunjukkan adanya modal sosial yang kuat dalam komunitas. Mobilisasi politik yang bersifat horizontal dan berbasis komunitas ini memiliki efektivitas tinggi karena didasarkan pada kepercayaan dan jaringan sosial yang telah ada, sehingga dapat menjangkau segmen masyarakat yang mungkin tidak terjangkau oleh sosialisasi formal. Ketiga, masyarakat memiliki ekspektasi yang tinggi terhadap kualitas penyelenggaraan pemilu, dengan menekankan pentingnya integritas, transparansi, dan kepatuhan terhadap peraturan dalam setiap tahapan pemilu, yang mencerminkan kesadaran kritis tentang standar demokrasi yang harus dipenuhi.

Temuan-temuan penelitian ini memiliki implikasi penting bagi pengembangan strategi peningkatan partisipasi politik dan penguatan demokrasi lokal. Tingginya antusiasme dan kesadaran politik masyarakat harus dijaga dan dipelihara melalui edukasi pemilih yang berkelanjutan dan sosialisasi yang komprehensif untuk memastikan bahwa partisipasi tidak hanya tinggi secara kuantitas, tetapi juga berkualitas dalam hal pemahaman terhadap isu-isu politik dan visi-misi kandidat. Peran masyarakat sebagai agen mobilisasi dan sosialisasi perlu difasilitasi dan diperkuat melalui program pemberdayaan relawan demokrasi dan penguatan kapasitas tokoh masyarakat informal agar mereka dapat menyampaikan informasi politik secara akurat dan objektif. Penyelenggara pemilu harus merespons ekspektasi tinggi masyarakat dengan memastikan setiap tahapan pemilu dilaksanakan dengan standar tertinggi integritas dan profesionalisme, serta memberikan ruang yang memadai bagi partisipasi dan pengawasan masyarakat. Keterlibatan aktif masyarakat dalam pengawasan pemilu perlu didukung dengan penyediaan informasi yang transparan dan mekanisme pelaporan pelanggaran yang mudah diakses. Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi politik di Kelurahan Pandu berada pada tingkat yang menggembirakan dan memiliki potensi untuk terus berkembang, namun memerlukan dukungan sistematis dari berbagai pemangku kepentingan untuk memastikan bahwa partisipasi tersebut berkontribusi pada penguatan demokrasi yang substansif dan berkelanjutan di tingkat lokal.

E. Daftar Pustaka

- Almond, Gabriel A. dan Sidney Verba. (1963). *The Civic Culture: Political Attitudes and Democracy in Five Nations*. Princeton: Princeton University Press.
- Almond, Gabriel A. dan G. Bingham Powell. (1996). *Comparative Politics: A Developmental Approach*. Boston: Little, Brown and Company.

- Beetham, David. (1991). *The Legitimation of Power*. London: Macmillan.
- Birch, Sarah. (2010). Perceptions of Electoral Fairness and Voter Turnout. *Comparative Political Studies*, 43(12), 1601-1622.
- Burns, James MacGregor. (1978). *Leadership*. New York: Harper & Row.
- Coleman, James S. (1988). Social Capital in the Creation of Human Capital. *American Journal of Sociology*, 94, S95-S120.
- Diamond, Larry dan Leonardo Morlino. (2005). *Assessing the Quality of Democracy*. Baltimore: The Johns Hopkins University Press.
- García Reyes, Miguel. (2013). Participación política y ciudadanía en América Latina. *Revista de Ciencias Sociales*, 19(2), 234-251.
- Huntington, Samuel P. dan Joan M. Nelson. (1994). *Partisipasi Politik di Negara Berkembang*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Lazarsfeld, Paul F., Bernard Berelson, dan Hazel Gaudet. (1948). *The People's Choice: How the Voter Makes Up His Mind in a Presidential Campaign*. New York: Columbia University Press.
- Levi, Margaret dan Laura Stoker. (2000). Political Trust and Trustworthiness. *Annual Review of Political Science*, 3, 475-507.
- Miaz, Yalvema. (2018). Pola Perilaku Pemilih pada Masa Orde Baru dan Era Reformasi. *Jurnal Ilmu Sosial Mamangan*, 7(2), 83-94.
- Norris, Pippa. (2014). *Why Electoral Integrity Matters*. New York: Cambridge University Press.
- Padang, Donal Fariz dan Afifah Nur Megawati. (2018). Partisipasi Politik Pemilih Pemula dalam Pemilihan Umum. *Jupiiis: Jurnal Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial*, 10(2), 57-62.
- Papamarcos, Steven D. (1977). The Civic Culture and Political Participation: A Reassessment. *Western Political Quarterly*, 30(4), 524-538.
- Putnam, Robert D. (1993). *Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy*. Princeton: Princeton University Press.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Surbakti, Ramlan. (2013). *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Grasindo.